

KANTOR BERSAMA KPBU REPUBLIK INDONESIA

PPP Joint Office Government of Indonesia

KEGIATAN DI MINGGU KE DUA FEBRUARI 2020

INFRASTRUKTUR AIR MINUM, PERUMAHAN RAKYAT, KESEHATAN & CAPACITY BUILDING

Informasi Internal Kantor Bersama KPBU

Rapat Koordinasi SPAM Regional Jatigede



11 Februari 2020

Rapat dibuka oleh Bapak Brahmantio Isdijoso selaku Direktur PDPII Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh Ibu Tirta dari Direktorat Perumahan, Perkotaan dan Permukiman, Direktur Utama PT Tirta Gemah Ripah, perwakilan 5 PDAM offtakers, perwakilan Bappeda Prov. Jabar, perwakilan dari BBWS, PT PII, PT SMI serta dinas terkait. Adapun tujuan dari rapat hari ini yakni untuk membahas fasilitas PDF dari Kementerian Keuangan terhadap proyek KPBU SPAM Regional Jatigede.

Akses air minum layak di Provinsi Jawa Barat mencapai 76% dari target 86%. Proyek SPAM Jatigede yang dinyatakan sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dinilai telah memenuhi aspek administratif dan prosedural. Selain menggelar rapat pada Senin 10 Februari 2020 dengan 5 offtakers yang hadir, yaitu; PDAM Tirta Meda Kab. Sumedang, PDAM Tirta Dharma Kab. Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kab. Majalengka, PDAM Tirta Dharma Ayu Kab. Indramayu dan PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, rapat juga diselengi dengan sesi sharing knowledge terkait tata cara dan gambaran penurunan NRW (*non revenue water*) dengan perusahaan oleh PT. Tirta Gemah Ripah.

Ke-lima offtakers menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih di masing-masing daerah tidak sebanding dengan demand yang sangat tinggi. Pengusulan fasilitasi PDF yang akan segera diproses oleh Kementerian Keuangan perlu menyampaikan AMDAL dan SIPA. Mengingat lokasi intake saat ini milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung dan merupakan lokasi baru, akan dilaksanakan rapat teknis lanjutan untuk membahas hal tersebut.

Training Outline Business Case

13 - 14 Februari 2020



Kegiatan *training OBC* ini dihadiri oleh Perwakilan dari Dinas Perumahan Permukiman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat, Direktur Utama PT. Tirta Jabar, perwakilan dari offtaker dan tim KPBU SPAM Regional Jatigede.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pihak yang terlibat dalam proyek KPBU Spam Regional KPBU untuk dapat mengerti hal - hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen pra-studi kelayakan. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, LKPP, PT. PII dan PPP JO Expert.

Dalam *Training OBC SPAM Regional Jatigede* ini, Para Narasumber memberikan paparan hasil review dari delapan kajian dalam dokumen *Outline Business Case* yang telah disusun oleh BPPSPAM. Kegiatan review in dilakukan secara interaktif sehingga para narasumber dan peserta sama - sama belajar untuk memahami gap informasi yang perlu menjadi catatan yang dapat disampaikan kepada konsultan penyusun dokumen *Final Business Case*.

Selanjutnya dihari ke dua, para peserta difasilitasi oleh LKPP mengenai tata cara pengadaan KPBU, proses pelelangan satu tahap serta mengenai persiapan penandatanganan kontrak.

RAPAT KOORDINASI

Pembahasan rencana design lahan Proyek KPBU Rusun Cisaranten



Rapat dihadiri oleh Direktur Perumusan dan Evaluasi, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, perwakilan Direktorat KPSRB Bappenas, perwakilan Direktorat PDPPI Kementerian Keuangan, Tim World Bank, Tim Crisil, dan Tim JLL.

Beberapa rencana pengembangan kawasan yang akan dibangun di area Pusjatan adalah Area Uji, Gedung Perpustakaan, Koperasi, Mess Pegawai dan Gudang Bahan. Terdapat 2 opsi dalam penggunaan lahan. Pertama, desain dibuat diatas konfigurasi tanah 1 dengan mengintegrasikan beberapa kebutuhan Pusjatan. Kedua, desain dilakukan pada konfigurasi tanah 1 ditambah tanah 2 dan 3 dengan mengintegrasikan beberapa kebutuhan. Topografi sedang dilakukan oleh Tim Arsitek pada kedua opsi. Opsi kedua perlu dilakukan *survey* dengan metode RDS (*Responden driven sampling*) untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

Saat ini RDS sedang dilakukan oleh Tim JLL dengan sampel 100 responden rusunawa dan 100 responden lainnya sebagai responden rusunami. Agenda selanjutnya adalah submit interim report pada minggu ke-2 Bulan April 2020 dan market sounding pada bulan yang sama minggu ke tiga.

RAPAT KOORDINASI

Persiapan Audiensi dengan DPRD
Proyek KPBU RSUD Kalteng



Rapat dibuka oleh Ibu Tanti Hidayati selaku Deputy Direktur PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan dihadiri oleh konsultan, PII, Proyek pengembangan RS Doris dari RS Pendidikan Tipe B Menjadi RSUD Tipe A dengan lingkup KPBU; Pembiayaan, Konstruksi, Pemeliharaan dan Perbaikan. PT. PII akan melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap besaran AP yang telah dihitung. Perhitungan AP terakhir dari konsultan berkisar di angka Rp 172 milyar.

Hal yang menjadi concern selain perhitungan AP adalah lahan. Lahan yang akan digunakan tersebut milik Pemprov Kalteng, namun sertifikat lahan masih dalam proses pengajuan permohonan ke BPN.

Seluruh pihak mengharapkan pembangunan RSUD ini dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. PT. PII bersamaan dengan Pemprov Kalteng pada diskusi hari Selasa, 11 Februari menargetkan pendandatangan kerjasama dapat dilakukan pada Bulan Februari 2021, *financial close* pada Agustus 2021, masa konstruksi pada bulan September 2021, sehingga RSUD sudah dapat beroperasi mulai September 2023.

SOSIALISASI KPBU

Inspektorat Bidang Administrasi Umum & Inspektorat
Bidang Kinerja Kelembagaan



Kegiatan ini dihadiri oleh Pak Oktorika selaku Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas beserta jajaran IBAU dan IBKK. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan skema KPBU sebagai salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia kepada APIP internal Bappenas sekaligus meningkatkan pemahaman APIP Kementerian PPN/Bappenas atas skema KPBU.

KPBU sebagai alternatif pembangunan infrastruktur, bukan satu-satunya pilihan/solusi untuk semua pembangunan. Banyak tahap yang dilakukan pada skema KPBU, tidak jarang menemukan kejadian yang janggal pada badan usaha.

Narasumber pada sosialisasi KPBU ini berasal dari perwakilan Kantor Bersama. Para peserta diperkaya pengetahuannya oleh perwakilan dari perwakilan Direktorat PDPPI Kementerian Keuangan, Perwakilan Direktorat KPSRB Kementerian PPN/Bappenas, Perwakilan dari Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri, Perwakilan dari LKPP dan Perwakilan dari PT. PII.

Pada diskusi ini peserta aktif bertanya mengenai resiko dan pengembalian investasi dengan menjabarkan contoh kasus yang seringkali dijumpai.

Hal yang paling sering dipertanyakan terkait alokasi resiko dan pengembalian nilai investasi dengan Availability Payment (AP). Mulai dari 'siapa' bertanggung jawab atas 'apa', dan 'siapa' yang memiliki kewajiban untuk membayar. Pak Slamet Rona dari Kemenkeu menjabarkan bahwa yang layak untuk pengembalian investasi dengan AP adalah daerah dengan APBD yang sehat, selain itu akan diteliti saat proses OBC.